Laporan Investigasi Kerusakan Hulu DAS Batang Toru

Jejak PT. Toba Pulp Lestari dalam Bencana Ekologi Sumatera

16 Desember 2025

ksppm
Kelompok Studi dan
Pengembangan Prakarsa Masyarakat
2025

Jejak TPL Dalam Bencana Ekologi Sumatera

Laporan Investigasi Kerusakan Hulu Sungai di Sektor Aek Raja, dan Dampaknya terhadap Banjir dan Longsor di Tapanuli Selatan

1. Pendahuluan

Bencana yang menimpa Sumatera Utara telah meninggalkan duka yang mendalam. Ribuan orang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Kejadian tersebut mendapat sorotan luas dari publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berbagai pihak menyoroti buruknya tata kelola hutan di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab tragedi ini. Sejumlah perusahaan dituding memiliki peran di balik terjadinya bencana tersebut. Seperti yang dilansir oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas bencana ini.[1]

Temuan WALHI tersebut diperkuat oleh hasil investigasi yang dilakukan oleh KSPPM yang menyatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara tidak terlepas dari deforestasi yang berlangsung secara masif selama sekitar 34 tahun terakhir. Sebagai contoh, di Kabupaten Tapanuli Selatan sejak tahun 1990 telah terjadi penurunan luas hutan alam sekitar 46.640 hektar, sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai sekitar 16.137 hektar.[2]

Salah satu dari tujuh perusahaan yang dinilai memiliki andil besar dalam terjadinya bencana ini adalah PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Sebagaimana diketahui, PT TPL saat ini memiliki izin konsesi seluas 167.912 hektar yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Dari wilayah tersebut, enam kabupaten yang mengalami banjir dan longsor pada 15 November lalu berada di dalam area konsesi PT TPL, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.[3]

[1]. https://www.waspada.id/medan/walhi-sumut-sebut-7-perusahaan-biang-keladi-bencana-ekologis-di-tapanui/
[2]. https://ksppm.org/2025/11/28/hutan-habis-bencana-datang-tragedi-ekologis-terburuk-dalam-35-tahun-terakhir/
[3]. https://ksppm.org/2025/12/05/jejak-tpl-dalam-bencana-ekologis-sumatera-utara/

Berbagai kritik dan sorotan telah sampai kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 12 Desember lalu kementerian menerbitkan Surat Nomor S.468/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tertanggal 8 Desember 2025 tentang penangguhan sementara akses penatausahaan hasil hutan pada wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada hari yang sama, TPL juga menerima surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.4.4.44/237/DISLHK-PHPS/XII/2025 tertanggal 10 Desember 2025, yang berisi penghentian seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk pada area Penggunaan Kawasan Restorasi (PKR).[4]

Tidak berhenti sampai di situ, pada 15 November 2025 melalui konferensi pers Kementerian Kehutanan, pemerintah menyampaikan telah mencabut 22 izin perusahaan yang terbukti berkontribusi terhadap terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Khusus terkait PT TPL, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan dilakukannya audit dan evaluasi secara menyeluruh. Apabila terbukti melakukan pelanggaran perizinan serta menyebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), maka izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL akan dicabut.[5]

Respons pemerintah tersebut disambut baik oleh masyarakat Tano Batak yang telah cukup lama berjuang agar perusahaan tersebut hengkang dari wilayah Tapanuli. Sebelumnya, elemen masyarakat yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene untuk Keadilan Ekologi Sumatera Utara telah melakukan demonstrasi pada 10 November lalu di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Aksi tersebut menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merekomendasikan penutupan TPL kepada pemerintah pusat.[6]

2. Masalah

Salah satu wilayah paling terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Wilayah ini dilalui oleh sejumlah sungai besar, salah satunya Sungai Batang Toru. Di Sungai Batang Toru ditemukan banyak gelondongan kayu yang diduga terbawa dari wilayah hulu.

[4]. https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-hentikan-sementara-operasional-pt-toba-pulp-lestari-2098167
[5]. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8260942/prabowo-perintahkan-toba-pulp-diperiksa-terkait-tuduhan-penyebab-banjir?utm_source=whatsapp
[6]. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8203160/massa-aksi-tuntut-gubsu-bobby-rekomendasi-tutup-tpl

Kerusakan di bagian hulu sungai Batang Toru tersebut disinyalir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak banjir dan longsor di wilayah Batang Toru.

Berdasarkan analisis citra satelit, diketahui bahwa salah satu hulu Sungai Batang Toru berada di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di wilayah Tarutung, yaitu Sungai Sigeaon atau yang lebih dikenal sebagai Aek Sigeaon. Sungai ini mengalir langsung menuju Sungai Batang Toru dan bertemu dengan sejumlah sungai lain yang berasal dari wilayah timur Tarutung, khususnya daerah Sipahutar. Aek Sigeaon merupakan sungai yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat, bahkan diabadikan dalam sejumlah lagu Batak, salah satunya oleh Buntora Situmorang.

Total panjang Sungai Aek Sigeaon, jika diukur dari hulu di Tarutung hingga bermuara ke Sungai Batang Toru, mencapai sekitar 24 kilometer. Dengan panjang dan debit alirannya, sungai ini dikenal sebagai salah satu sungai terbesar di wilayah Tano Batak.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan analisa *overlay* yang dilakukan oleh KSPPM, terdapat delapan sungai besar yang menjadi sumber utama Aek Sigeaon, yaitu Sungai Aek Raja, Sungai Aek Goti-Goti, dan Sungai Aek Arung, serta didukung oleh sedikitnya 64 anak sungai. Kedelapan sungai beserta anak-anak sungai yang menjadi hulu Aek Sigeaon berada di Kecamatan Aek Raja dan Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Wilayah tersebut merupakan bagian dari area konsesi TPL Sektor Aek Raja.

Sejak 28 November hingga 13 Desember, KSPPM melakukan investigasi lapangan untuk menelusuri kondisi hulu Sungai Sigeaon. Dari rangkaian investigasi tersebut, KSPPM mencatat setidaknya sepuluh temuan yang menunjukkan terjadinya kerusakan serius di hulu Sungai Sigeaon, yang merupakan bagian penting dari sistem hulu Sungai Batang Toru.

Metodologi yang digunakan KSPPM dalam penyusunan laporan ini meliputi investigasi lapangan secara langsung, khususnya di sektor Aek Raja, wawancara dengan masyarakat setempat, analisis tutupan lahan menggunakan citra satelit, serta penumpangtindihan (*overlay*) peta izin konsesi terbaru TPL yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

3. Temuan

Sektor Aek Raja merupakan salah satu dari lima sektor wilayah konsesi TPL di kawasan Tapanuli Raya. Sektor ini memiliki total luas konsesi sebesar 45.562 hektar. Secara etimologis, nama Aek Raja dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai "Raja Air" atau disimpulkan sebagai wilayah dengan sumber air yang melimpah (*aek* berarti air). Namun, keberadaan konsesi PT TPL di wilayah ini telah mengubah bahkan menghilangkan berbagai sumber air yang berasal dari daerah tangkapan air bagi masyarakat serta bagi sejumlah sungai besar di wilayah hilir, termasuk Sungai Aek Sigeaon dan Sungai Batang Toru.

Di wilayah ini, TPL mulai beroperasi sejak tahun 1992. Jika dihitung berdasarkan siklus tanam dan panen, perusahaan telah melakukan rotasi penanaman dan pemanenan eucalyptus sebanyak sekitar lima hingga enam kali. Namun, tidak seluruh area mengalami jumlah rotasi yang sama. Di beberapa lokasi, seperti Lobu Sikkam, rotasi tanam dan panen baru berlangsung sekitar dua kali, sementara di wilayah lain, seperti Tor Honas, aktivitas perusahaan masih berada pada tahap awal perluasan area tanam.

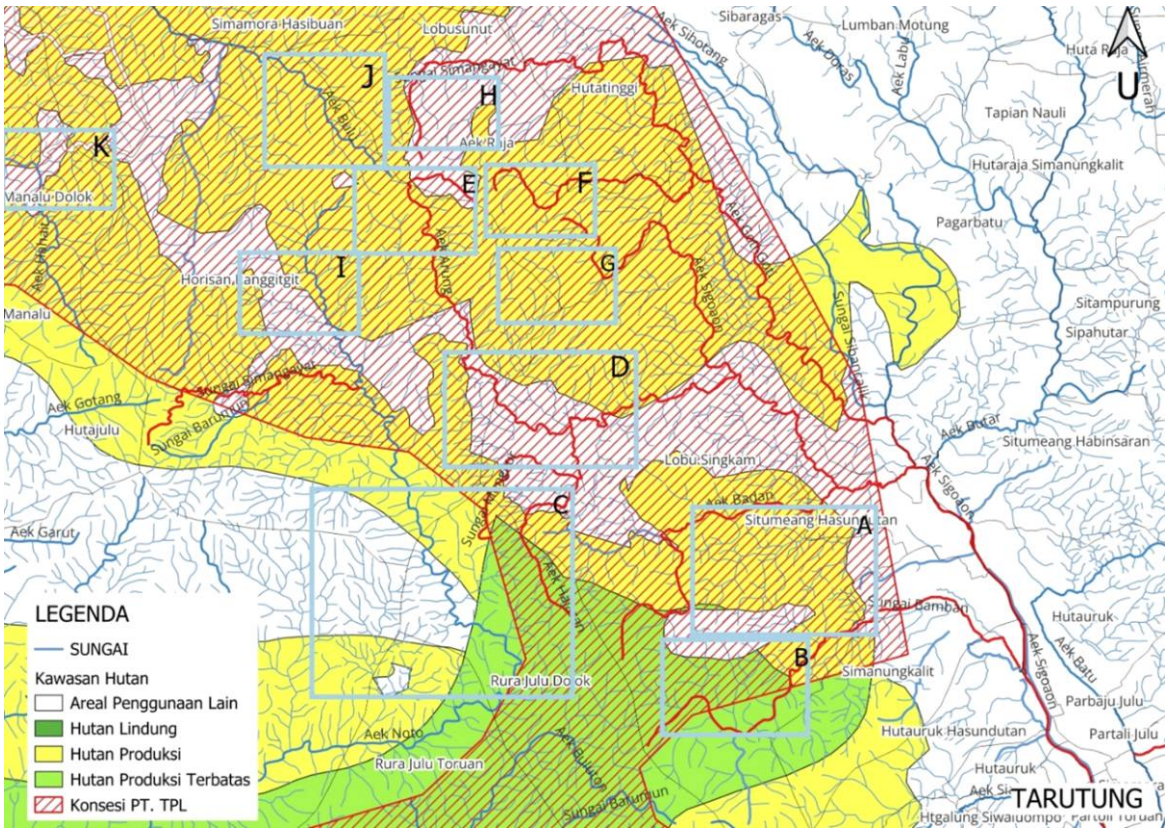

Gambar 1: *Wilayah Konsesi TPL Sektor Aek Raja (Dok. KSPPM)*

Keterangan:

a. Garis aliran sungai yang diberi warna merah adalah sungai yang mengalir ke aek Sigeaon,

b. Blok A-K merupakan:
   - Blok A-Tutupan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hulu Sungai Aek Raja
   - Blok B-Bukaan Lahan Baru dan Titik Longsor Hulu Aek Tambok Simin
   - Blok C-Konsesi PT TPL dan Aliran Sungai ke Aek Sigeaon
   - Blok D-Titik Hulu Sungai Aek Goti-Goti dan Penutupan Aliran oleh Eukaliptus
   - Blok E-Sitikko Langit: Bukaan Baru dan Jejak Aliran Sungai yang Hilang
   - Blok F-Titik Temu Hulu Sungai ke Aek Arung dan Kedekatan Eukaliptus
   - Blok G-Hulu Sungai Aek Badan dan Bukaan Jalan Konsesi
   - Blok H-Seminari-Sipoholon: Penebangan Kayu dan Hulu Sungai ke Aek Sigeaon
   - Blok I-Kawasan APL dalam Konsesi dan Aliran Sungai Baru
   - Blok J-Hulu Sungai Terfragmentasi dan Risiko Banjir di Hilir
   - Blok K-Titik Hulu Sungai Tertutup Vegetasi Monokultur dan Dampak Ekologis

Menurut data Rupa Bumi Indonesia (RBI), di dalam wilayah konsesi TPL Sektor Aek Raja terdapat puluhan anak sungai serta delapan sungai besar yang menjadi hulu Aek Sigeaon hingga bermuara ke Sungai Batang Toru. Kondisi sungai-sungai tersebut saat ini sangat memprihatinkan. Sebagian mengalami kerusakan berat, bahkan tidak lagi berfungsi sebagai alur sungai. Kerusakan ini disebabkan oleh deforestasi yang berlangsung secara masif serta aktivitas penanaman eucalyptus hingga ke sempadan dan badan sungai.

Selain itu, ditemukan indikasi bahwa beberapa alur sungai sengaja ditimbun dan dialihfungsikan menjadi areal tanam eucalyptus, sehingga memicu terbentuknya alur-alur air baru yang tidak alami. Berikut ini dipaparkan 10 (sepuluh) temuan KSPPM terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan TPL terhadap keberadaan dan perlindungan hulu Sungai Aek Sigeaon di wilayah Sektor Aek Raja.

3.1. Desa Lobu Singkam, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara
Desa Lobu Singkam merupakan bagian dari Sektor Aek Raja. Di lokasi ini ditemukan pembukaan hutan alam sekitar ±30 hektar. Lahan ini telah ditanami pohon eucalyptus. Penebangan tersebut diduga dilakukan oleh PT TPL sekitar enam bulan lalu. Kawasan ini berada di zona perbukitan hulu yang memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, terdapat sekitar ±17 titik alur sungai yang merupakan bagian dari hulu Aek Sigeaon. Jarak antara lokasi hulu tersebut dengan Sungai Aek Sigeaon diperkirakan sekitar 8,3 kilometer.

***Gambar 2**: Bukaan hutan alam yang telah ditanaimi eukapitus dan sangat berdekatan dengan persawahan masyarakat (Dok. KSPPM, Desember 2025)*

3.2. Di lokasi yang sama yakni Lobu Singkam, terdapat juga bukaan hutan alam untuk pembukaan jalan. Sebagian bukaan lahan tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Di sekitar titik pembukaan jalan tersebut terdapat sekitar ±10 titik hulu sungai yang menjadi sumber aliran air, yang seluruhnya mengalir ke Sungai Aek Sigeaon. Kuat dugaan bahwa penebangan hutan alam tersebut dilakukan oleh adalah TPL untuk mobilisasi pengangkutan bahan baku eukaliptus.

***Gambar 3**:Pembukaan hutan alam untuk pembuatan jalan, (98.91306652777779, 2.0488623055555553) Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.3. Tidak jauh dari Lobu Singkam, tepatnya di kawasan Seminari–Sipoholon, yang terletak di sebelah barat daya, teridentifikasi adanya bukaan baru hutan alam. Berdasarkan keterangan warga setempat, aktivitas pembukaan lahan tersebut diduga dilakukan oleh TPL dengan perkiraan luas sekitar 3 hektar. Hingga saat ini, sebagian area masih berada dalam tahap penebangan kayu dan belum seluruhnya ditanami eucalyptus. Ini menunjukkan bahwa proses konversi hutan masih berlangsung. Lokasi bukaan ini memiliki nilai ekologis yang tinggi karena di dalamnya terdapat sekitar 11 titik hulu sungai yang seluruhnya terhubung ke Sungai Aek Sigeaon dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air.

***Gambar 4**: Kondisi hutan di sebelah barat daya Seminarium, rumah doa HKBP Sipoholon. (98.90738375000001, 2.0434970555555556) Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.4. Kembali ke Lobu Singkam, terdapat longsor yang berjarak sekitar ±100 meter dari jalur tanaman eucalyptus. Longsor tersebut memiliki lebar sekitar ±5 meter dan menimpa badan jalan. Pada bagian bawah lereng terdapat alur sungai yang dikenal sebagai Aek Sibara-bara, dengan jarak sekitar ±500 meter dari titik longsor. Selain Aek Sibara-bara, di sekitar lokasi ini teridentifikasi sekitar ±4 titik hulu sungai, dengan rincian delapan alur sungai mengalir ke Sungai Hajaran dan satu alur sungai mengalir ke Sungai Mungkur. Kedua sungai tersebut bermuara ke Sungai Aek Sigeaon, dengan jarak sekitar 6,6 kilometer dari lokasi temuan.

***Gambar 5**: Titik longsor yang hanya berjarak ± 100 meter dari eukaliptus. (98.87662833333333, 2.070491666666667) Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.5. Masih di Desa Lobu Singkam, ditemukan adanya anak sungai bernama Tambok Ni Begu yang berada sangat dekat dengan areal tanaman eucalyptus. Sungai ini merupakan bagian dari hulu aliran Sungai Aek Arung, yang selanjutnya terhubung dengan Sungai Aek Sigeaon.

Selain Tambok Ni Begu, pada lokasi tersebut juga teridentifikasi sekitar ±5 hulu anak sungai lainnya yang seluruh alirannya bermuara ke Sungai Aek Arung. Sungai Aek Arung merupakan salah satu dari delapan sungai besar yang menjadi sumber aliran Sungai Aek Sigeaon, yang selanjutnya mengalir ke Sungai Batang Toru.

Jarak antara Sungai Aek Arung dan Sungai Aek Sigeaon diperkirakan sekitar 5,8 kilometer

***Gambar 6**: Salah satu hulu sungai Aek Arung yakni Tambok Ni begu yang sangat berdekatan dengan tanaman eukaliptus. (98.87406999999999, 2.0852983333333337) Dok. KSPPM, Desember 2025.*

***Gambar 7**: Titik ini diduga merupakan hulu utama Aek Arung, yang selanjutnya mengalir dan terhubung ke Aek Sigeaon. Pada lokasi ini, aliran sungai sudah hilang karean ditanami pohon eukaliptus.* (98.87301888888888, 2.1152045833333335) Dok. KSPPM, Desember 2025.

3.6. Aek Raja, Kecamatan Parmonangan

Di Aek Raja ditemukan Sungai Aek Tambok Simin. Sungai ini merupakan salah satu sumber air utama bagi masyarakat, khususnya untuk mengairi persawahan. Sungai Aek Tambok Simin memiliki fungsi vital sebagai penopang kehidupan masyarakat dan juga merupakan salah satu hulu Sungai Aek Sigeaon.

Namun demikian, lokasi sungai tersebut berada di dalam wilayah konsesi TPL. Jarak antara aliran sungai dengan tanaman eucalyptus yang ditanam di area konsesi sangat dekat, yakni hanya sekitar 23–25 meter.

***Gambar 8**: Sungai Tambok Simin yang merupakan aliran sungai ke sawah masyarakat di Desa Aek Raja, gambar diambil pada saat selesai hujan sehingga terlihat keruh dan volume airnya banyak. Pada musim kemarau sungai akan lebih kecil. (98.86288611111111, 2.11065). Dok. KSPPM.*

3.7. Masih di sekitar Aek Raja, tepatnya di Sitikko Langit dan sekitarnya, ditemukan aliran sungai yang tertutup dan terhimpit oleh tanaman eukaliptus, sehingga jejak alirannya tidak lagi tampak jelas. Selain itu, terlihat pula bukaan lahan baru yang bersebelahan dengan blok eukaliptus yang sudah lebih dulu ada. Berdasarkan data Rupa Bumi Indonesia (RBI), dilokasi ini terdapat sekitar ±6 titik hulu aliran sungai yang mengalir ke Aek Sigeaon. Namun, karena keberadaan pohon eukaliptus, hulu-hulu tersebut tidak tampak jelas.

***Gambar 9**: Seharusnya ada ±6 hulu sungai, namun pada gambar tidak terlihat lagi karena sudah dikelilingi oleh eukaliptus. (98.8773843611111, 2.11310975), Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.8. Sungai Aek Goti-Goti merupakan sungai kedua setelah Sungai Aek Arung yang menjadi sumber aliran sungai besar Aek Sigeaon, yang selanjutnya mengalir ke Sungai Batang Toru. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, alur Sungai Aek Goti-Goti telah tertutup oleh pepohonan eucalyptus milik TPL, sehingga jejak aliran sungainya tidak lagi terlihat.

Jarak antara Sungai Aek Goti-Goti dan Sungai Aek Sigeaon diperkirakan sekitar 10,9 kilometer.

Gambar 10

Gambar 11*: Hulu Aek Goti-Goti yang mengalir ke Aek Sigeaon sudah dikelilingi oleh eukaliptus (98.88374950000001, 2.114299861111112), Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.9. Di sepanjang jalan dari Aek Raja menuju Lobu Singkam, ditemukan adanya aliran-aliran sungai baru yang tidak tercatat sebelumnya. Aliran-aliran ini menuju ke beberapa sungai seperti Aek Arung dan Aek Goti-goti, yang selanjutnya bermuara ke Sungai Aek Sigeaon. Di lokasi tersebut terlihat jarak tanaman eucalyptus yang sangat dekat dengan titik-titik hulu sungai. Berdasarkan data sungai dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), seharusnya terdapat sekitar tujuh titik hulu sungai.

***Gambar 12**: Contoh aliran-aliran air yang baru yang seharusnya lokasi ini adalah hulu sungai. (98.885345, 2.1048983333333333), Dok. KSPPM, Desember 2025.*

3.10. Sungai Aek Raja (Simangayat) adalah sungai ketiga yang menjadi sumber aliran sungai besar Aek Sigeaon, yang selanjutnya mengalir ke Sungai Batang Toru. Di sekitar sungai ini teridentifikasi sejumlah titik longsor yang berada di dalam wilayah konsesi TPL. Lokasi longsor tersebut berdekatan dengan area tanaman eucalyptus dan hanya dipisahkan oleh badan jalan. Di bagian bawah lereng longsor mengalir Sungai Aek Raja (Simangayat), yang juga berada di dalam area konsesi PT TPL. Hulu-hulu Sungai Aek Raja (Simangayat) yang melintasi kawasan terdampak longsor tersebut sebagian besar berada dalam wilayah konsesi dan telah ditanami eucalyptus. Jarak Sungai Aek raja (Simangayat) ke sungai Aek Sigeaon diperkirakan sekitar 14,76 km.

***Gambar 13**:*
Longsor di badan jalan yang berdekatan dengan hulu sungai Aek Raja. (98.85675833333333, 2.1341027777777777). Dok.KSPPM, Desember 2025.

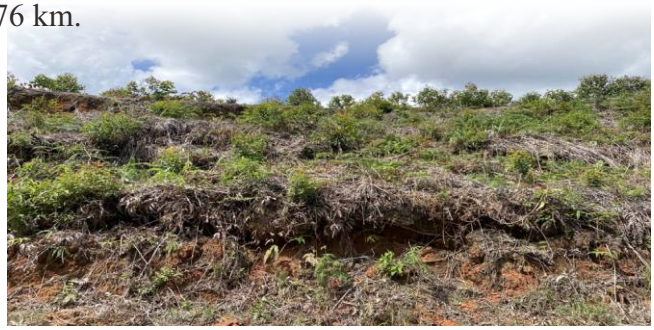

***Gambar 14**:*
Di bagian atas longsor badan jalan yang sudah ditanami eukaliptus. (98.85675833333333, 2.1341027777777777), Dok. KSPPM, Desember 2025.

4. Kesimpulan

Dalam kerangka *Disturbed Ecosystem Theory*, ekosistem hutan alam memiliki fungsi yang sangat kompleks. Ia mampu menyerap air hujan apalabila musim hujan datang, lalu menahan erosi/longsor, menjaga keanekaragaman hayati dan menstabilkan siklus hidrologi. Ketika hutan alam yang holtikultur digantikan dengan tanaman monokultur seperti *eucalyptus* maka terjadi simplikasi ekosistem. Struktur akar yang dangkal dan bersifat hidrofobik, *eucalyptus* mempercepat limpasan permukaan, sehingga air hujan tidak lagi dapat terserap dengan baik ke dalam tanah. Hal ini adalah bukti nyata sebuah gangguan ekosistem yang telah mengurangi kapasitas regulasi hidrologis.

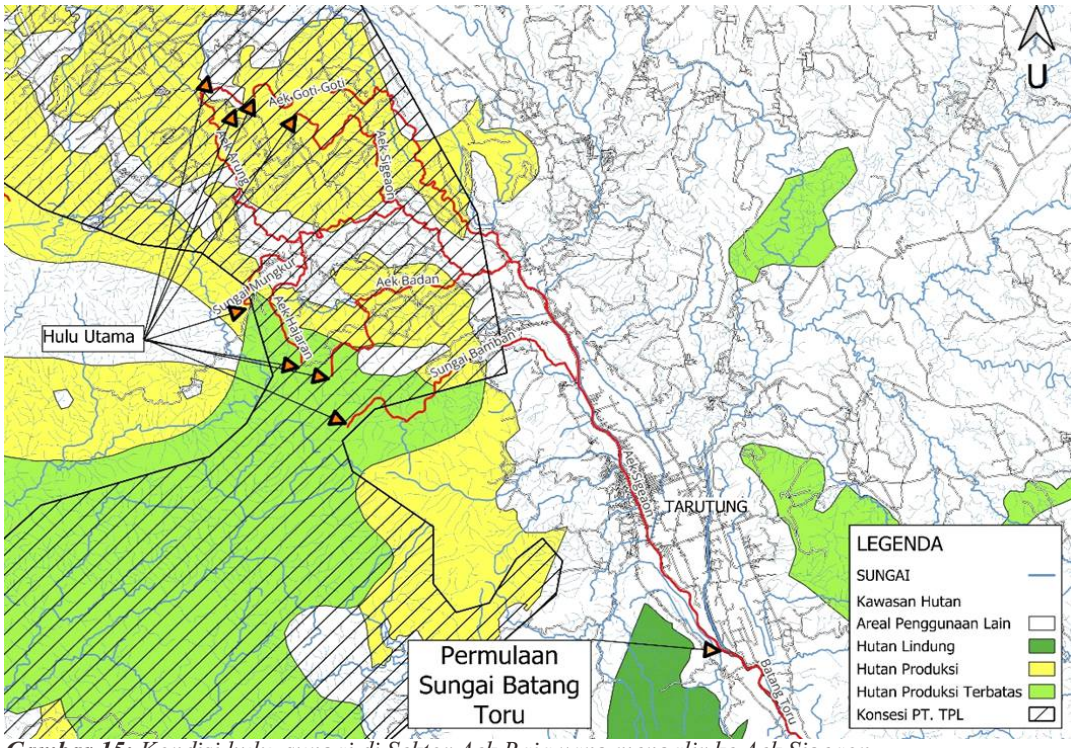

Gambar 15: *Kondisi hulu sungai di Sektor Aek Raja yang mengalir ke Aek Sigeaon, selanjutnya bermuatra ke Sungai Batang Toru (Dok. KSPPM)*

Gangguan terhadap ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan akumulatif dan sistematis. Pembalakan hutan selama bertahun-tahun, mengubahnya menjadi tanaman industri (penanaman monokultur), menciptakan kondisi kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Contohnya adalah kondisi kritis yang terjadi di hulu DAS Aek Sigeaon sebagai salah satu sungai yang cukup besar yang langsung mengalir ke sungai Batang Toru. Ketika hujan lebat datang, sistem yang sudah terganggu tidak sanggup lagi untuk menahan tekanan dan akibatnya, sehingga bencana ekologis (banjir, longsor) menjadi konseskuensi yang pasti terjadi.

Ekosistem yang terganggu telah kehilangan resiliensi dalam bentuk "kemampuan untuk pulih dari tekanan". Dalam kasus bencana ekologis saat ini, secara khusus bencana banjir di wilayah Batang Toru, hilangnya hutan alam mengindikasikan telah hilangnya lapisan tanah dan juga jaringan akar yang mampu menahan air. Akibatnya, debit sungai akan meningkat drastis, memicu banjir yang akan merugikan banyak pihak. Kerugian sangat besar menjadi akibatnya, baik berupa korban jiwa maupun kerugian material sebagaimana yang telah terjadi pada 25 November 2025 lalu. Sebaliknya, saat musim kemarau tiba, banyak anak-anak sungai yang mengering. Hal ini sebagai tanda bahwa hutan alam sudah rusak, pohon-pohon tak lagi sanggup untuk menahan debit air.

Banjir bukanlah sekedar fenomena hidrometeorologis, melainkan manifestasi dari ekosistem yang terganggu oleh karena produk-produk kapitalis. Dalam perspektif ini, bencana yang terjadi adalah hasil interaksi antara tekanan eksternal (curah hujan yang tinggi), dan kondisi internal ekosistem yang sudah sangat rusak. Dengan kata lain, hujan hanya sebagai pemicu, sementara yang menjadi akar permasalahan yang paling utama adalah kerusakan ekologis di hulu sungai.

5. Rekomendasi

Berdasarkan kondisi tersebut, dugaan keterlibatan TPL dalam bencana di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Batang Toru, berkaitan erat dengan perubahan tutupan hutan alam menjadi tanaman eucalyptus monokultur. Keberadaan konsesi PT TPL di wilayah hulu yang menyimpan banyak sumber air bagi Aek Sigeaon, yang selanjutnya mengalir ke Sungai Batang Toru, menjadi salah satu faktor utama terjadinya kerusakan ekosistem.

Perubahan tutupan lahan tersebut menyebabkan menurunnya fungsi kawasan hulu sebagai daerah tangkapan air. Akibatnya, saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada 25 November lalu, debit air meningkat secara signifikan dan membawa material berupa gelondongan kayu serta lumpur ke wilayah hilir, sehingga memperparah dampak banjir dan longsor.

Atas dasar temuan tersebut, kami menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pemerintah segera mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) serta menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.
- Pemerintah melakukan pemulihan hutan-hutan kritis, khususnya pada kawasan hulu dan daerah tangkapan air.
- Pemerintah mengembalikan pengelolaan dan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat, yang telah terbukti mampu menjaga dan melestarikan hutan secara berkelanjutan.

6. Penutup

Demikian laporan ini disusun untuk digunakan seluas-luasnya sebagai bahan meyakinkan para pihak, khususnya pemerintah, bahwa keberadaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) telah menimbulkan krisis ekologis dan sosial yang mendalam bagi masyarakat Tapanuli Raya. Keberadaan perusahaan ini tidak lagi menjadi jawaban bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan justru menjadi sumber bencana serta pemiskinan struktural.

KSPPM berharap melalui data dan temuan yang disajikan dalam laporan ini, rencana evaluasi dan audit menyeluruh terhadap PT TPL dapat segera dilakukan sebagai langkah awal untuk mempercepat proses penutupan permanen perusahaan tersebut.

Disusun oleh:

ksppm

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

Parapat, 16 Desember 2025

Tim Investigasi:

1. Kalang Buwana Zakaria (Staf Study Advokasi KSPPM)
2. Delima Padang (Staf Pengorganisasian KSPPM)
3. Abadi Aritonang (Staf Pengorganisasian KSPPM)
4. Susi Halawa (Staf Study Advokasi KSPPM)

Penanggung Jawab:

Rocky Pasaribu

Direktur KSPPM